



UNIVERSITAS TERBUKA

PERAN SERTA KELOMPOK PROFESI IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

MIMMIM ARUMI WARDIATI

NIP. 131 573 168

1989

80118

BAHAN PENUNJANG PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
 BAB I : Pendahuluan	 1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	6
3. Tujuan Penulisan	7
4. Metode Penulisan	7
 BAB II : Peran Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	 8
1. Gambaran Lingkungan Hidup di Indonesia	8
a. Pengertian-pengertian mengenai Lingkungan Hidup, Ruang Kehidupan, Wilayah Perkotaan dan Kempung Kota	 8
b. Masalah Lingkungan Hidup secara umum	11
c. Masalah Perkotaan	16
2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	27
a. Latar Belakang IAI	27
b. Data IAI	31
c. Keanggotaan IAI	32
d. Kelengkapan Organisasi IAI	32
e. Sebagai Organisasi Tingkat Nasional	33
f. Kepengurusan dan Anggota IAI	34
g. Lain-lain	35
h. Penerbitan IAI	36
i. Program Kerja IAI	37
j. Pelaksanaan Program IAI	38

3. Landasan Hukum dan Perangkat Pengelolaan Lingkungan Hidup	43
BAB III : Analisis	43
BAB IV : Kesimpulan dan Saran	71
Daftar Pustaka	76
Lampiran :	
Kode Tata laku Profesi Arsitek	
Anggaran Dasar IAI	
Anggaran Rumah Tangga IAI	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan di bumi disisi oleh sejumlah makhluk hidup yang saling berinteraksi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling beradaptasi satu sama lain jenis serta dengan benda-benda mati disekitarnya. Baik antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan serta antara manusia dengan benda-benda mati. Demikian pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan manusia, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan juga antara hewan dengan benda-benda mati disekitarnya. Masing-masing komponen alam tersebut saling mempengaruhi satu sama lain serta mempunyai pengaruh yang bermacam-macam bentuk dan sifatnya.

Kehidupan makhluk hidup dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, sehingga dapat melangsungkan kehidupannya. Maka untuk mengetahui, menyelidiki dan memahami alam bekerja sehingga mengetahui keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupannya, berkembanglah suatu ilmu yang dinamakan Ekologi yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. (Amsyari, 1981:11).

Satuan pokok ekologi adalah ekosistem, yakni satuan kehidupan atau tatanan yang utuh menyeluruh dari makhluk hidup dengan unsur lingkungan hidup lainnya yang saling mempengaruhi

dan saling tergantung dalam suatu kesatuan perikehidupan. Terdapat dua bentuk ekosistem penting yang perlu diketahui, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah sering kali dianalogikan dengan lingkungan hidup alami, yang mempunyai heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup sehingga dapat mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri secara berkesinambungan (self-sustained). Sedangkan ekosistem buatan atau dapat juga dikatakan sebagai lingkungan hidup binaan merupakan lingkungan hidup alam yang diubah melalui intervensi manusia, yang mempunyai ciri kurang heterogenitasnya.

Hal ini menyebabkan lingkungan hidup binaan tersebut bersifat labil dan perlu bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusia supaya dapat tetap stabil yaitu berupa perawatan terhadap ekosistem yang dibuatnya itu.

Ekosistem buatan ini terjadi karena manusia merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang mempunyai perbedaan penting dari makhluk hidup lainnya, yaitu manusia mempunyai alam pikiran (noosfir). Sehingga dengan akalnya memungkinkan berkembang kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu, serta menentukan pilihan apa yang hendak dilakukannya. Kemampuan manusia antara lain dengan mengelola lingkungan hidup alam menjadi lingkungan hidup binaan atau lingkungan hidup buatan.

Pengelolaan lingkungan hidup alam oleh manusia makin lama melebihi daya dukung alam, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada lingkungan hidup alam. Perubahan-perubahan yang

terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya (Amsyari, 1981:35-44).

Penguasaan akan alam pikiran telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat memungkinkan manusia seolah-olah menjadi penguasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, baik dilihat dari sudut tata ruang maupun pengaruh fungsional serta strukturalnya manusia cenderung untuk mendominasi biosfir (Giller Jr, 1979). Dominasi ini diperkuat dengan kenyataan bahwa tuntutan manusia terhadap habitatnya sangat berat apabila hal itu dilihat dari sudut kemampuan daya dukung alami bumi itu sendiri.

Manusia dalam mengelola alam terlihat secara sepihak, yakni dengan kecenderungan dan perhatian yang besar bagi pencapaian kebutuhannya sendiri dalam jangka waktu yang pendek. Manusia bersikap eksporatif, dan tanpa disadari mengelabui diri sendiri. Dengan kegiatan manusia yang sangat eksploratif dalam jangka pendek tersebut akan meracuni kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia sendiri dalam jangka panjang.

Kepandaian manusia dalam mengelola alam harus dibarengi dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kerusakan alam yang diakibatkannya. Skala dan kerumitan kebutuhan manusia akan sumberdaya telah meningkat pesat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan produksi. Alam ini mempunyai sumberdaya yang berlimpah, tetapi juga mudah rusak apabila penggunaannya

melampaui ambang batasnya dan bila hal ini terjadi alam berada pada kesetimbangan yang kritis, serta membahayakan integritas dasar sistem alam.

Pemikiran terhadap perlindungan ekosistem alam diprakarsai oleh gerakan perlindungan ekosistem, yang diperkuat oleh salah satu alat yang ampuh yaitu hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Perhatian yang lebih besar terhadap masalah lingkungan hidup, sebagai gerakan dunia dapat melalui perkembangan hukum lingkungan demi kelangsungan perikehidupan di dunia ini.

Para ahli lingkungan hidup mengangkat masalah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah pada Konferensi PBB dan menjadi pembicaraan pokok di Stockholm pada bulan Juni 1972. Pada Konferensi tersebut diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau dan pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972 Konferensi mensahkan hasil-hasilnya. Pada Konferensi Stockholm tersebut menetapkan tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup sedunia". Kemudian diadakan pertemuan internasional dalam bidang hukum lingkungan untuk pertama kalinya pada Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law di Montevideo, Uruguay.

Melalui Hukum Tata Lingkungan yang diharapkan dapat mengatur penataan lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berbagai aspek lainnya dari Hukum Lingkungan yang perlu ditangani lebih terperinci dan khusus, seperti Hukum Kesehatan Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan,

Hukum Perencanaan Lingkungan, Hukum Transaksional/Internasional dan Hukum Perselisihan Lingkungan.

Penataan Lingkungan dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sosial budaya, yang juga dapat dikaitkan pada pemanfaatan ruang untuk kesejahteraan manusia dan mencari keserasian timbal balik yang paling baik antara ruang dan masyarakat demi kepentingan masyarakat sendiri. Sehingga jangkauan Hukum Tata Lingkungan lebih luas dari Hukum Ruang.

Pengaturan dan perencanaan penataan lingkungan dapat melalui studi ilmiah terlebih dahulu dan intervensi pemerintah, yang juga mencakup pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, yang salah satunya dapat berupa kebijaksanaan pembangunan (=planologi materiil) dan dapat juga dilakukan oleh pihak swasta masyarakat.

Ikatan Arsitek Indonesia sebagai lembaga profesi mempunyai pula peranan dalam penataan lingkungan hidup. Dengan kemampuan yang ada Ikatan Arsitek Indonesia dapat ikut serta dalam penataan Pemukiman penduduk di daerah perkotaan. Pada daerah perkotaan masalah pemukiman penduduk merupakan salah satu masalah pokok yang cukup mendasar, kepadatan penduduk mengakibatkan timbulnya daerah kumuh yang menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam kaitan ini peranan Ikatan Arsitek Indonesia diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ini.

2. Permasalahan

Negara kita saat ini terus bergiat mengejar ketinggalannya dengan negara lain, upaya yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dengan diberlakukannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dimulai sejak awal zaman Orde Baru dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Sejalan dengan pembangunan tersebut timbul pula masalah lingkungan hidup, hal ini dapat terlihat dengan timbulnya dengan kerusakan hutan akibat eksploitasi agresif demi pemasukan devisa, demikian pula yang ditimbulkan oleh eksploitasi tambang seperti batu bara, minyak bumi, emas, galian pasir dan lain-lain. Perencanaan akibat kemajuan industripun tak dapat dihindari, di mana limbah buangan industri dibuang begitu saja ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu.

Pada prinsipnya pembangunan adalah memajukan taraf hidup, dengan demikian manusia yang menghendaki kemajuan ataupun menginginkan perubahan hidup berusaha untuk mendapatkannya. Kota besar yang menjadi tujuan utama yang sangat didambakan dalam mengejar impian untuk mendapatkan perubahan hidup, guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut maka kota-kota besar menjadi tujuan pendatang (urbanis).

Hal ini mengakibatkan beban kota besar menjadi berat melebihi daya dukung kota, yang pada akhirnya menimbulkan daerah kumuh dan terjadi kesenjangan sosial.

Disamping itu kelangkaan air bersih akibat eksploitasi menambah beban kota besar.

Dalam pemecahan masalah lingkungan hidup ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, hal ini memerlukan peran serta masyarakat luas.

Dalam kaitan ini Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dapat berperan serta bersama pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup.

Maka permasalahannya adalah sejauhmana peran Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam pengelolaan lingkungan hidup hingga sekarang dan kemungkinan dimasa datang.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan paper ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan lembaga profesi (Ikatan Arsitek Indonesia/IAI) sebagai lembaga swadaya masyarakat sebagai patner pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, apakah sudah ada peraturan hukumnya, seandainya sudah ada apakah peraturan-peraturan tersebut sudah memadai.

4. Metode Penulisan

Penulisan paper ini dilakukan berdasarkan studi literatur dari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan lembaga profesi yang ada, peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada, wawancara dengan orang yang banyak yang mengetahui kegiatan profesi arsitek.

BAB II

PERANAN IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Gambaran Lingkungan Hidup di Indonesia

a. Pengertian-pengertian mengenai Lingkungan Hidup, Ruang Kehidupan, Wilayah Perkotaan dan Kampung Kota

- 1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 2) Ruang dalam suatu wilayah adalah merupakan wadah/tempat bagi manusia untuk melakukan kegiatan kehidupannya. Ruang untuk kehidupan adalah wujud fisik lingkungan disekitarnya kita dalam dimensi geografis baik horisontal maupun vertikal.
- 3) Lahan adalah permukaan bumi, tempat berlangsungnya berbagai kegiatan. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas yang penggunaannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukannya secara berencana untuk maksud-maksud pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk dan pembangunan maka lahan dalam pemanfaatannya secara optimal dan efisien perlu ditata penggunaannya.



- 4) Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.
- 5) Wilayah adalah satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, menurut batasan ruang lingkup pengamatan tertentu apakah pendekatan perencanaan ataupun batasan administratif. Daerah adalah wilayah menurut batasan ruang lingkup kewenangan administrasi daerah. Wilayah sebagai batasan administratif kewenangan pemerintah daerah dapat berupa Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Kecamatan & Desa.
- 6) Wilayah perkotaan adalah wilayah yang dibatasi lingkup pengamatan fungsi kota sebagai tempat pemukiman dan pemusatan beberapa jasa pelayanan pemerintah, sosial, ekonomi dan distribusi yang didominasi kegiatan usahanya bukan pertanian, yang meliputi wilayah daratan, lautan beserta wilayah angkasa yang terkait padanya.
- 7) Wilayah pedesaan adalah wilayah yang dibatasi lingkup pengamatan penyelenggaraan mekanisme kegiatan usaha manusia dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang meliputi wilayah daratan, lautan beserta wilayah angkasa yang terkait padanya di luar wilayah perkotaan.
- 8) Kawasan adalah pembagian dari suatu wilayah menurut batasan ruang lingkup pengamatan atau fungsi kegiatan tertentu.

- 9) Kawassan budi daya adalah bagian dai suatu wilayah yang mempunyai fungsi budi daya (dominasi fungsi pemukiman dan kegiatan usaha) dan usaha mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup.
- 10) Kawasan non budi daya adalah bagian dari suatu wilayah yang mempunyai fungsi non budi daya (dominasi fungsi lindung terhadap tanah, air flora, fauna dan budaya) dengan sudah mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup dimana di dalamnya tidak diperkenankan adanya fungsi budi daya ataupun kalau terpaksa diperkenankan harus dalam fungsi terbatas yang menunjang fungsi lindung.
- 11) Tata ruang adalah wujud struktural yang menggambarkan pemanfaatan dan ikatan manfaat ruang yang terpadu bagi sektor-sektor pembangunan.
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses pemanfaatan lahan/ruang secara dinamis dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya yang meningkat terus dari waktu ke waktu di suatu wilayah secara optimal, efisien dan serasi.
- 12) Usaha pengelolaan kualitas tata ruang secara optimum dan efisien baik dalam bentuk dan perubahannya maupun dalam kaitan pemanfaatannya dari waktu ke waktu perlu memperhatikan kelestarian tata air, udara, dan tanah di dalam suatu wilayah secara dinamis dalam mengejar pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dinamis pula.

13) Pengertian kampung adalah himpunan atau kumpulan:

a. Desa, dusun.

b. Kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota

Pengertian kampung memang dapat menyebabkan kesimpang siuran dan kekaburan, dari penglihatan ahli perencanaan tata ruang dan sosiologi. Pengertian yang dipakai di sini adalah lebih diartikan kepada yang umum dalam kaitannya dengan pengertian perencanaan tata ruang wilayah perkotaan yaitu suatu kelompok rumah-rumah atau lingkungan perumahan yang merupakan bagian wilayah perkotaan.

Kita sadari dalam kenyataan praktek pembangunan kampung kota, kedua pengertian tersebut "community" dalam pengertian sosiologi dan "neighbourhood unit" dalam pengertian lingkungan fisik atau ruang (spatial) tidak bisa dipisahkan karena saling mengkait dan saling mempengaruhi dalam pembentukan kualitas lingkungan dan kualitas manusia.

b. Masalah Lingkungan Hidup secara umum

Pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi juga menimbulkan perubahan diberbagai bidang ekonomi, fisik wilayah, sumber alam dan lingkungan hidup secara sistem nilai.

Dalam pembangunan timbul permasalahan yang merupakan tantangan dan bila diperhatikan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor pokok, masing-masing sebagai berikut:

1) Perkembangan penduduk dan masyarakat

Perkembangan penduduk kita mempunyai ciri-ciri kependudukan, yaitu:

- a) Jumlah penduduk makin bertambah.
- b) Sebagian besar penduduk berusia muda.
- c) Pertambahan penduduk yang besar jumlahnya, penyebarannya tidak merata pada seluruh kepulauan Indonesia. Kepadatan penduduk di pulau Jawa dan Madura lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.
- d) Besarnya penduduk yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian: 80% penduduk yang hidup di pedesaan.
- e) Meningkatnya penduduk yang masuk pasar kerja dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang bervariasi 2 - 3% setahun dari jumlah pencari kerja sebesar 50 - 56% juta.

2) Perkembangan sumber alam dan lingkungan

Permintaan akan sumber alam, khususnya tanah dan air menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk, seperti di Jawa dan Madura, disertai tingkat pendapatan yang rendah. Sedangkan di luar pulau Jawa terdapat masalah tanah yang dipengaruhi oleh cara pola pertanian peladang pindahan yang menyebabkan kondisi tanah menjadi kritis akibat pengurasan dan kegiatan peladangan ini.

Selain itu permintaan terhadap penggunaan air semakin meningkat, antara lain diperlukan untuk irigasi, air minum, rekreasi dan lainnya. Persediaan air tetap sedangkan permintaan air meningkat dan kemampuan alam menahan air makin berkurang..

Disamping itu sumber lainnya seperti tanaman, pepohonan, sumber aquatis dan sumber mineral memerlukan pengelolaan yang efektif dan tepat.

Berkurangnya sumber alam dan kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh masalah kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup sehingga memerlukan pengelolaan sumber alam dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup yang efektif dan tepat.

3) Perkembangan teknologi dan kebudayaan

Pada negara maju banyak melahirkan penemuan baru dan teknologi baru yang padat modal dengan penggunaan tenaga kerja yang sedikit.

Sedangkan pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia kurang gmiliki modal dan kesempatan memperluas teknologi yang lebih serasi dengan lingkungan tanah dan airnya. Oleh karena itu masyarakat kita perlu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang terjadi di negara-negara lain terutama di negara maju.

Perkembangan teknologi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ruang lingkup kebudayaan. Kemampuan bertahan terhadap budaya luar yang ada pada berbagai

pola kebudayaan luar yang ada pada berbagai pola kebudayaan kita tidaklah sama sehingga proses penyesuaian tidak pula serupa.

4) Perkembangan ruang lingkup internasional

Laju pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan dunia internasional.

Pengaruh negara maju di bidang perdagangan, teknologi, investasi, bantuan luar negeri dan lainnya, masih sangat besar terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain itu perkembangan dunia internasional menunjukkan keadaan yang kurang mantap terutama selama sepuluh tahun belakangan ini.

Selain ini perkembangan ekonomi dunia dikuasai oleh pandangan aliran Klasik dan Neo-Klasik yang menempatkan kebebasan mekanisme pasar selaku alat pengelola sumber alam sebagai prinsip pokok.

Dalam mekanisme pasar ini harga merupakan pedoman bagi kegiatan produksi dan konsumsi. Tetapi harga hanya berlaku terhadap barang yang dimiliki perorangan.

Sumber alam berupa udara, air, sungai, laut, danau, hutan berikut isinya tidak dimiliki orang, dan tersedia gratis tanpa harga.

Selain itu teknologi produksi dan pola konsumsi tumbuh dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya terhadap lingkungan. Pengurusan sumber daya berlangsung di mana-mana dengan adanya mekanisme pasar yang

mengabaikan peranan barang dan sumber alam yang belum memiliki kegunaannya untuk waktu sekarang. Misalnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, zat dan benda yang tidak diketahui manfaat dan kegunaannya bagi manusia sekarang, sehingga dengan tidak jelas kegunaannya maka ia tidak memiliki nilai sehingga luput dari perhitungan ekonomi pembangunan. Dan kemusnahannya tidak dirasakan sebagai kerugian.

Begitu pula dengan pencemaran yang diakibatkan oleh pengelolaan alam dengan mengeksploitasi sumber alam. Sejalan dengan pengambilan sumber alam, pengelolaan alam tidak dibarengi dengan keharusan memperbaharuinya. Begitu pula hasil sampingan berupa sampah, kotoran, pencemaran limbah tidak masuk didalam biaya produksi.

Kegunaan sumber alam yang dicadangkan untuk generasi masa depan sulit untuk diukur harga dan nilainya, karena itu luput pula diperhitungkan dalam pembangunan.

Tampak pula masalah yang cukup serius yakni masalah limbah rumah tangga dari pemukiman, seperti sungai Ciliwung di Jakarta dan lainnya, juga masalah limbah industri dari lingkungan industri.

Pencemaran juga terdapat di kota-kota besar yaitu pada daerah pemukiman kumuh yang tidak mempunyai saluran air bersih dan kotor, tempat pembuangan sampah, penyediaan air bersih. Masalah ini berkaitan dengan

penataan lingkungan yang berupa perencanaan kota, perencanaan fisik, segi sosial budayanya dan ekonomi. Dengan demikian pola pembangunan yang berlaku selama ini menghasilkan kemajuan yang disertai dengan kerusakan lingkungan dan dampak pembangunan tersebut tidak menambah kekayaan materiil.

c. Masalah perkotaan

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab seluruh warga masyarakat, terutama dalam hal ini upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan perkotaan.

Dalam pembangunan di perkotaan timbul permasalahan yang merupakan tantangan yang harus diperhatikan yaitu antara lain:

1) Perbedaan tingkat kehidupan sosial ekonomi

Dalam melaksanakan pembangunan ini, dituntut adanya tatanan yang lebih mantap, memberi gairah kepada semua pelaku pembangunan, untuk itu diterapkan adanya tertib pembangunan yang sekaligus dapat menanamkan ciri-ciri atau identitas Indonesia sejajar dengan tatanan hidup dan budaya Bangsa, khususnya pada pembangunan fisik dan lebih khusus lagi penanaman nilai-nilai arsitekturnya.

Tetapi kita harus berkaca bahwa sebagian besar kondisi dan kehidupan rakyat Indonesia masih berjuang untuk mencapai kebutuhan dasarnya, masih bermukim di

satu ruang untuk kehidupan sehari-hari, yang berupa kamar tidur yang berfungsi juga sebagai dapur dan tempat kerja dan usaha. Tetapi di samping ada masyarakat dengan kehidupan yang sangat minim, serta ada juga masyarakat yang mempunyai taraf hidup yang tinggi yaitu dengan adanya pemukiman yang mewah lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan dan kemampuan usaha yang dapat menciptakan produksi yang optimal. Hal tersebut merupakan tantangan antara lain bagi dunia profesi, khususnya arsitek. Yang menjadi masalah kini bagaimana arsitek dapat ikut berperan mengatasi masalah kesenjangan sosial, yang diakibatkan oleh penataan lingkungan yaitu antara lain pembangunan fisik bangunan mewah yang berada di tengah pemukiman kumuh sehingga terjadi dampak sosial-budaya, perbedaan ekonomi yang menyolok.

Masyarakat belum mampu mengapresiasi nilai-nilai arsitektur, karena tingkat hidupnya belum merasakan sebagai kebutuhan. Maka dalam hal ini terdapat masalah komunikasi dan informasi untuk semua lapisan masyarakat.

Dalam mengejar perkembangan teknologi, penerapannya sebaiknya memperhatikan kondisi mayoritas masyarakat di negara kita, maka penataan lingkungannya lebih mementingkan semua golongan masyarakat dengan konsepsi perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan murah dan jauh dari dampak sosial ekonomi yang negatif. Upaya ini dapat dibantu oleh peran kelompok profesi.

2) Masalah perkembangan pemukiman dan pembangunan perumahan di Indonesia

Kota-kota di Indonesia pada umumnya, berkembang tanpa adanya perencanaan yang menyeluruh, dimana pola perkembangan yang ada sekarang, adalah mengikuti pola-pola kota lama, yang telah diletakkan atas hasil perencanaan dari pemerintahan Belanda. Dan usaha-usaha kelanjutannya hanya merupakan usaha-usaha perombakan dari pola lama tersebut, dalam arti perbaikan-perbaikan sebagian kecil dari pembangunan kotanya, sedangkan pemikiran perencanaan kota yang menyeluruh belum dilaksanakan benar-benar.

Kondisi ini berjalan terus, seiring dengan adanya perkembangan penduduk Indonesia setiap tahun $\pm 2,3\%$, sedangkan untuk kota-kota besarnya di Indonesia $\pm 4,5\%$ setiap tahun (Biro Statistik, 1980).

Dengan adanya perkembangan penduduk ini, sudah pasti membutuhkan tempat penampungan untuk kehidupannya dalam hubungan kebutuhan atas aktifitas dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Kita mengetahui dalam hal melayani akan kebutuhan untuk kehidupan penduduk itu, salah satu wadah atau tempat penampungannya adalah kota. Karena kota merupakan tempat pemusatan penduduk guna mendapatkan atau mencari aktifitas dan fasilitas yang lebih baik bagi tujuan kehidupannya. Sejarah telah membuktikan bahwa kota itu

selalu merupakan pusat kegiatan segi-segi kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik dan lain-lain, sehingga dengan adanya fungsi-fungsi dari kota tersebut, maka dalam perkembangannya menyebabkan berbagai akibat yang menyeluruh atau kompleks, karena disamping adanya perkembangan kebutuhan penduduk di dalam kota sendiri, juga ditambah dengan adanya perkembangan kebutuhan karena perpindahan penduduk dari luar kota ke dalam kota. (Mc. Lean, Mary, 1959 : 23).

Sehubungan dengan adanya perkembangan ini dapat dibayangkan, mengenai kondisi perkembangan kehidupan di kota-kota itu, di mana penduduk dengan perkembangan yang pesat, tak diimbangi oleh adanya usaha pemikiran perencanaan kota yang menyeluruh untuk menanggulangnya. Sehingga perkembangan kota itu, dalam fungsinya sebagai wadah guna melayani kebutuhan perkembangan penduduknya, berakibat berkembang tak menentu, tak terarah dan tak berpola.

Pola kota itu adalah sebagai cermin dari fungsi pelayanan-pelayanan kebutuhan penduduk tersebut dalam bentuk fisik. Dimana tak seimbangnya keadaan tersebut maka berakibat dalam pelayanan kebutuhannya menjadi dipaksakan seadanya dan tak teratur.

Jadi dalam perkembangan daerah perumahan di kota ini, terjadi proses yang tak seimbang antara jumlah penduduk yang membutuhkan perumahan (demand) dengan jumlah rumah dalam suatu lingkungan daerah perumahan (supply).

Adanya pertambahan penduduk yang terus menerus tiap tahun, ditambah dengan kondisi jumlah perumahan yang sudah tak memenuhi syarat dan mengalami kekurangan dalam tahun-tahun sebelumnya, hal ini berakibat timbul masalah daerah perumahan, bukan hanya dalam arti tak seimbangnya jumlah rumah dan penduduk yang membutuhkannya, tetapi juga berakibat parah terhadap kehidupan perkembangan keseluruhan kota, baik dalam arti sosial ekonomis ataupun fisik.

Kondisi ini bertambah parah sehubungan dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, dimana usaha penambahan jumlah perumahan hampir relatif kecil artinya bila dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, hal ini tak lain karena terbatasnya pembiayaan yang tersedia untuk usaha ini. Begitu pula usaha-usaha kontrol ataupun pengarahan pembangunan keseluruhan pola fisik kota, khususnya terhadap pembangunan-pembangunan daerah perumahan yang layak masih sangat terbatas.

Dari akibat semua ini dapatlah dibayangkan bagaimana kehidupan penduduk dalam daerah perumahan di kota itu, akan menghadapi berbagai macam kesulitan pada masa-masa yang akan datang.

Bukan hanya kesulitan untuk bertempat tinggal dalam rumah yang layak saja tetapi juga kesulitan kehidupan sosial ekonominya.

Keadaan ini bila dibiarkan berlarut-larut maka dalam perkembangan kota akan menyebabkan proses bongkar pasang di beberapa bagiannya, sedangkan penyakit keseluruhannya bertambah parah. Dimana pembangunan yang dilakukan melalui proses ini merupakan pemborosan biaya yang besar.

Ada atau tidak, sumber pembiayaan dari pemerintah untuk usaha pembangunan daerah perumahan, maka usaha yang dilakukan penduduk secara swasta dan pribadi akan berjalan terus dan jumlahnya pun tak kecil.

Dengan terjadinya pertambahan penduduk di kota dan adanya arus urbanisasi dari daerah-daerah sekitarnya ke kota, karena daya tarik dari kota yang mempunyai aktifitas dan fasilitas yang lebih baik, berakibat perlunya pertambahan daerah perumahan di kota dan di pinggiran kota atau pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga untuk menampungnya timbul di beberapa bagian kota secara tak terkontrol, baik di pusat, tengah ataupun pinggiran kota. Dimana dalam pengelompokkannya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan hidup dari penduduk untuk tujuan bertempat tinggal di kota.

Keadaan perkembangan ini jelas terlihat dari meningkatnya jumlah rumah dan kepadatan penduduk di kota (lingkungan yang dimaksud di sini lingkungan administratif), ataupun secara total perkembangan daerah perumahan diseluruh bagian kota dari tahun ke tahun.

Dalam pertumbuhan tak terkontrol dan tak adanya usaha pengaturan pola lingkungan kampung kota, maka tersebar pula daerah-daerah perumahan liar dan buruk keadaannya (slum area) di beberapa bagian kotanya. Penduduk yang bertendensi untuk berkonsentrasi dan bertempat tinggal di pusat kota atau daerah perumahan yang berbeda didekatnya karena sistem konsentrik dan sektoral, hal ini merupakan problem pula, dimana akan meningkatnya terus kepadatan di pusat kota, karena akibat daya tarik aktifitas dan fasilitas yang dibutuhkan penduduknya. Dan kondisi pengelompokan di pusat kota yang terus menerus meningkat itu menyebabkan berbagai kesukaran bagi perkembangan kotanya. Karena daerah perumahan di pusat kota yang luasnya relatif lebih sempit dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan keadaan lalu lintas (accessibility) yang pemakaiannya sudah lebih tinggi, sedangkan daya tampungnya terbatas. Hal ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dan kemacetan lalu lintas yang sangat mengganggu kelancaran kehidupan di kota terutama akibat mobilitas sebenarnya tidak perlu.

Jadi selama sistem pola lingkungan untuk tiap bagian kota itu belum dipikirkan pemecahannya, maka bagian kota itu belum dipikirkan pemecahannya. Maka suatu pemecahan yang hanya merupakan usaha bongkar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau kebutuhan sesaat, tanpa pemikiran fungsi yang tepat untuk masa sekarang dan yang akan datang, sejalan dengan adanya perkembangan

penduduk dari waktu ke waktu maka akibat keseluruhan yang kompleks, akan merupakan suatu lingkaran setan (viscious-circle), yang berulang kali dihadapi dalam saat melakukan usaha pembangunan.

Keadaan seperti, terlihat di kota Jakarta yang sedang giat melakukan pembangunan, dimana terjadi proses: bongkar pasang yang berulang kali untuk satu macam pembangunan di suatu tempat yang sama seperti usaha-usaha pembongkaran daerah perumahan dan pemindahannya, pelebaran jalan, pengusiran pedagang kali lima dan lain-lain.

Dimana karena usaha perbaikan itu tanpa pemikiran fungsinya yang sesuai dengan lingkungannya maka berakibat berulang kali, yang merupakan pemborosan biaya yang besar saja.

Jadi dengan adanya kondisi dari permasalahan atau persoalan-persoalan tersebut, suatu pemikiran untuk sistem pola pengelompokkan lingkungan daerah perumahan di kota, sebagai alat perencanaan pembaharuan (innovative planning) yang bersifat strategis bagi perkembangan kampung kota sangat diperlukan.

Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu diketahui mengenai sifat-sifat atau bagaimana terjadinya pengelompokkan daerah perumahan di kota, yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari berbagai aktifitas dan fasilitas di kota.

3) Permasalahan pembangunan kampung kota

Sebab utama terjadinya pengelompokan rumah-rumah di kota sehingga berupa lingkungan-lingkungan kampung kota baik di pusat, tengah maupun di pinggiran kota, adalah karena adanya pertambahan penduduk yang pesat di dalam kota dan ditambah dengan pendatang dari luar kota (urbanisasi).

Dengan meningkatkan kepadatan penduduk di tiap bagian kota, maka sudah pasti pengelompokan kampung kota akan mengalami kenaikan pula. Adanya kondisi perkembangan seperti ini dapat dibayangkan untuk masa-masa yang datang, apakah pemecahannya cukup dengan hanya adanya usaha perluasan kotanya saja?

Dengan mengingat pula adanya fungsi kota baik sebagai Ibu Kota Propinsi, Kota Pendidikan, Kota Torurisme dan lain-lain, maka proses perkembangan penduduk tersebut harus diimbangi oleh segala kebutuhannya berdasarkan lingkungan aktifitasnya. Karena dalam proses pengelompokkannya, penduduk akan bertempat tinggal mendakati tempat-tempat dimana ada inti aktifitas atau fasilitas-fasilitas yang mudah didapat untuk memenuhi kebutuhannya.

Keadaan pengelompokan ini dalam perkembangannya, sejalan dengan perkembangan kota, baik kelompok yang homogen (sama rata) ataupun yang heterogen (berbeda-beda) mendistribusi dan memperluas areal penggunaan

tanah untuk kebutuhan daerah perumahannya, baik di pusat kota, tengah ataupun pinggiran kota.

Jadi karena pengelompokan dari penduduk itu mendekati aktifitas dan fasilitas yang dibutuhkannya, maka kampung kota dalam pengelompokannya mengikuti pula, pola dimana terdapat inti-inti aktifitas dan fasilitas tersebut. Akibatnya maka baik di pusat kota, tengah kota ataupun pinggiran kota timbul:

- a) Kampung kota yang mendekati lingkungan daerah perdagangan.
- b) Kampung kota yang mendekati lingkungan pemerintahan.
- c) Kampung kota yang mendekati lingkungan pendidikan.
- d) Kampung kota yang mendekati lingkungan industri.
- e) Kampung kota yang mendekati lingkungan daerah rekreasi atau pariwisata serta peristirahatan.
- f) Kampung kota yang mendekati fasilitas yang dibangun untuk kebutuhan lingkungan militer. Pengelompokan ini karena alasan peninggalan sejarah atau sistem untuk keamanan serta pendidikan militer. Kekompleksanya karena bersifat militer maka dalam pembentukan lingkungannya bersifat lebih khusus.

Pengelompokan-pengelompokan ini dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi inti-inti aktifitas dan fasilitas di tiap daerah lingkungan yang dipengaruhi. Dimana tiap inti aktifitas dan fasilitas itu dalam mempengaruhi distribusi pengelompokannya mempunyai kekuatan

pengaruh yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan penduduknya dan letak tempatnya apakah di pusat kota, tengah kota atau pinggiran kota.

Besarnya pengaruh dari inti-inti atau pusat aktifitas dan fasilitas ini terhadap pengelompokan daerah perumahannya (derajat pengelompokan) bisa diukur dari keadaan perkembangan penduduk, distribusi dan kepadatannya di tiap lingkungan daerah perumahannya, serta distribusi/jumlah rumah di tiap lingkungannya.

Jadi dengan melihat prospek dari pengembangan penduduk dimasa yang akan datang sehubungan dengan proses pengelompokan lingkungan daerah perumahan yang disebabkan oleh pengaruh adanya inti-inti aktifitas dan fasilitas di tiap bagian kotanya, dianggap perlu untuk segera memikirkan pemecahannya bagi pengaturan pola perkembangan kampung kota yang berwawasan lingkungan yaitu dengan menyusun sistem penyebaran pola inti-inti aktifitas dan fasilitas untuk mengarahkan perkembangan lingkungan daerah perumahan kepada kondisi-kondisi yang memenuhi syarat-syarat planologis sehingga tercapai efisiensi bagi intensitas dan ekstensitas penggunaan tanah bagi perkembangan perencanaan kota yang menyeluruh.

2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

a. Latar belakang Ikatan Arsitek Indonesia

Sejak manusia mulai hidup berkelompok dan mengenal seorang pemimpin, sejak itu pulalah dikenal sistem pembagian tugas dan pekerjaan dalam suatu masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan tersebut, keberhasilan pelaksanaannya sangat menentukan kelangsungan hidup kelompok itu. Hidup mati kelompok ini, memang tergantung dari kesediaan dan kemampuan kerja anggota-anggotanya terutama mereka yang telah dianggap dewasa. Oleh karena itu, mereka yang mampu menunaikan tugas yang langsung menyangkut nasib kelompok itu dengan baik, selalu memperoleh penghargaan dan tempat yang terhormat dalam masyarakatnya. Dari sinilah lahir 'etos', yaitu "bekerja dan menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, adalah suatu kehormatan yang besar".

Semua suku bangsa di Indonesia, juga mengenal etos kerja. Bahwa untuk hidup manusia harus makan. Makan adalah sarana bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan selanjutnya mengembangkan kehidupan. Tersedianya makan, haruslah diupayakan. Oleh karena itu untuk dapat makan, manusia harus bekerja terlebih dahulu. Sangat diyakini, bahwa hidup-bekerja-makan dan pengembangan hidup adalah mata rantai daur kehidupan sirkuler manusia.

Dari sinilah kita kemudian mengenal "kearifan Tradisional" suku-suku bangsa di Indonesia yang menyatakan bahwa: "bekerja adalah ritus untuk mencapai kesempurnaan hidup".

Belajar dari etos kerja dan kearifan tradisi yng telah kita miliki sejak dahulu kala tersebut, memberikan keyakinan pada kita bahwa pembangunan bangsa dan negara akan berhasil, apabila setiap warga negara mau bekerja dengan sebaik-baiknya dibidangnya masing-masing menghasilkan karya yang terbaik yang dapat ia berikan dan sebesar-besarnya memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakatnya.

Hal yang sangat mendasar yang mencakup peran serta warga negara, hasil karya untuk rakyat banyak dan kesejahteraan masyarakat luas, tertulis pula sebagai esensi pembangunan nasional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (pada BAB V - Penutup).

Esensi ini, harus menjadi pegangan setiap warga negara sebagai Kode Etika, yaitu bekerja mencari nafkah dengan tetap mengabdikan diri pada kepentingan umum.

Kini, di zaman pembangunan masyarakat Indonesia yang modern, pembagian tugas dan pekerjaan dalam masyarakat telah mengalami diferensiasi yang amat luas.

Penerapan bermacam keahlian ilmu dan Teknologi, kedalam berbagai sektor pembangunan yang dijemakan dalam bentuk berbagai "profesi", merupakan bagian yang sangat penting dalam diferensiasi peran serta para warga negara dalam turut bertugas membangun bangsa dan negara ini.

Kita bersyukur, bahwa karena sumbernya adalah "panggilan nurani" dan sifatnya yang lebih dari "pengabdian" itu, maka dasar dan landasan "profesi", masih tetap mengikuti dan

sangat sejalan dengan etos, etika dan kearifan tradisi yang kita miliki seperti tersebut pada uraian di atas.

Pada hakekatnya, profesi adalah suatu pengikatan janji (komitmen) dalam seseorang mencari nafkah dengan berkarya. Profesi adalah lebih dari sekedar "bekerja" (okupasi): ia lebih dari sekedar "panggilan" (vokasi). Profesi bersifat bekerja dan berkarya secara penuh rasa "pengabdian" mengacu pada terus menerus mengembangkan ilmu dan Keahlian dibidangnya.

Jadi profesi itu bersumber daripada bagian yang terdalam dari diri manusia yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk "panggilan nurani" untuk berkarya dengan pengabdian dan pengamalan Ilmu dan Keahlian untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari pengertian fundamental, maka:

1) Dalam profesi, harus dicakup:

- a) Adanya keahlian khusus.
- b) Adanya tanggung jawab.
- c) Adanya kesejawatan.

2) Bahwa tujuan berprofesi adalah:

- a) Memberi karya yang terbaik yang dapat dihasilkannya.
- b) Sebesar-besarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3) Bahwa kaidah berprofesi adalah:

- a) Mencari nafkah dengan mengabdikan keahlian sebagai pelayanan untuk kepentingan masyarakat.
- b) Tidak merugikan masyarakat dengan menghindari terjadinya "pertentangan kepentingan" dan oleh karena

itu memiliki pegangan "kode etika" dan "kode tata laku keprofesian".

4) Bahwa pengertian "profesional" adalah orang yang mencari nafkah dengan berprofesi, yang harus memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a) Mandiri.
- b) Bekerja penuh.
- c) Berorientasi pada pelayanan, mengabdikan pada kepentingan umum.
- d) Memiliki keahlian khusus yang berlatar belakang pendidikan tertentu.
- e) Terus menerus mengembangkan ilmu dan keahliannya.

Praktek berprofesi berarti melaksanakan janji "komitmen" bagi si-profesional, untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, melalui hubungan antara dia dengan masyarakat yang membutuhkan keahliannya dan mempercayainya.

Interaksi dalam pengertian "hubungan kerja" ini merupakan hal yang terpenting dalam praktek berprofesi. Hubungan kerja ini pertama-tama dan terutama adalah didasarkan pada kepercayaan dan saling percaya.

Aturan hubungan kerja profesional, harus diwujudkan dalam bentuk pegangan yang di satu pihak berbentuk "landasan hukum" untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa profesional itu, serta untuk menjamin nafkah bagi/dan dapat dihasilkannya karya yang terbaik oleh si profesional. Di lain pihak berbentuk kode etika profesional dan kode tata laku

keprofesian, untuk menjamin terhindarnya tindakan kesewenang-wenangan, yaitu yang ahli menipu yang awam, yang kuat membunuh yang lemah.

Esensi dari peraturan/perundang-undangan tentang profesi adalah mengatur seluk beluk interaksi dalam praktek berprofesi, untuk tujuan sebesar-besarnya memperoleh hasil karya yang terbaik dan menjamin perlindungan pada masyarakat.

Dari sini, IAI mempunyai tekad:

- a) Memulai dari dirinya sendiri, menghormati kaidah berprofesi secara benar.
- b) Mengajak profesi bidang lain untuk melakukan hal yang sama.
- c) Mengajak semua organisasi profesi untuk bersama-sama menjadi mitra bangsa dan negara mewujudkan pranata keprofesian, menjadi peraturan dan perundang-undangan.

b. Data Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

- 1) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1959 dan dikukuhkan dengan akte Notaris Lie Kwee Nio Nomor 56, tanggal 14 Nopember 1959.
- 2) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dikukuhkan kedudukannya di Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor D.IV 2360/d/11/75, tanggal 22 Maret 1975.
- 3) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) terdaftar resmi sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, sesuai dengan pelaksanaan Undang-

undang Keormasan Nomor 8 tahun 1985.

- 4) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sedang dalam proses sebagai organisasi berbadan hukum di Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

c. Keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Ikatan Arsitek Indonesia adalah juga;

- 1) Member Institute of ARCASIA (Architects Regional Council Asia).
- 2) Member National Section of the UIA (International Union of Architects).
- 3) Founder - member of AAPH (Asean Association of Plainning and Housing).

d. Kelengkapan organisasi Ikatan Arsitek Indonesia

Sebagai organisasi profesi Arsitek satu-satunya di Indonesia, IAI telah memiliki piranti/kelengkapan organisasi yang disediakan untuk berkemampuan memberikan kualifikasi dan klasifikasi profesional kepada anggotanya secara bertahap, selaras dengan situasi dan kondisi tatanan "profesionalisme" di Indonesia, yaitu:

- 1) Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, yang telah menyatakan dan mengatur tentang keanggotaan profesional.
- 2) Memiliki Kode Tata Laku Profesi Arsitek (Code of Ethics and Profesional Conducts).
- 3) Memiliki Standar Hasil Karya Arsitek (Minimum Standard of Performance).

4) Memiliki aturan imbalan jasa Arsitek (Scales of Fees for Profesional Architects Services).

5) Memiliki Standard Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pemberi Tugas.

6) Memiliki perangkat dalam organisasinya yang memanifestasikan "ciri organisasi profesi", antara lain:

a) Majelis Arsitek IAI yaitu Badan Normatif yang bertugas mengawasi dilaksanakannya Kode Tata Laku Profesi Arsitek oleh anggota IAI, serta menyelesaikan masalah-masalah pelanggarannya.

b) Badan Pendidikan Arsitek yang bertugas memantau dan memutuskan kebijaksanaan pembinaan "profesi arsitek".

c) Badan Profesi yang bertugas memantau dan merumuskan kebijakan pembinaan "profesi arsitek".

d) Badan Sistem Informasi Arsitek (SINFAR) yang bertugas mengumpulkan dan menyebar luaskan berbagai informasi dan data yang berhubungan dan erat kaitannya dengan kegiatan Arsitektur di Indonesia maupun internasional. Badan ini juga membawahi pengelolaan perpustakaan dan Bank Data IAI.

7) Memiliki sistem "magang" untuk mengantar anggota biasa menjadi anggota profesional yang berkualifikasi praktisi.

e. Sebagai Organisasi Tingkat Nasional

Ikatan Arsitek Indonesia adalah organisasi profesi tingkat nasional yang berpusat di Jakarta dan sampai saat

ini telah memiliki 12 (dua belas) cabang, masing-masing;

- 1) Dista Aceh.
- 2) Sumatera Utara.
- 3) Sumatera Barat.
- 4) Sumatera Selatan.
- 5) Bengkulu.
- 6) DKI Jakarta.
- 7) Jawa Barat.
- 8) Jawa Tengah.
- 9) D.I.Yogyakarta.
- 10) Jawa Timur.
- 11) Bali.
- 12) Sulawesi Selatan.

Kedudukan Kantor Pusat IAI, untuk sementara di Jalan Pasar Minggu Km.16, Pancoran, Jakarta 12780.

f. Kepengurusan dan Anggota IAI

Kepengurusan IAI yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Cabang IAI adalah:

- 1) Pengurus IAI Tingkat Pusat.
- 2) Pengurus IAI Tingkat Cabang (12 Propinsi).
- 3) Majelis Arsitek.
- 4) Badan pendidikan Arsitek IAI.
- 5) Badan Profesi IAI.
- 6) Badan Sistem Informasi Arsitek (SINFAR) IAI.

Jumlah anggota IAI seluruhnya 2.406 orang sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI yang

baru, maka anggota IAI terdiri atas:

- 1) Anggota Profesional: 411 orang
- 2) Anggota Biasa : 1.995 orang
- 3) Anggota Kehormatan : 1 orang
- 4) Anggota Peserta : 1 orang.

g. Lain-lain

1) Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)

Ikatan Arsitek Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta telah memberi persyaratan/lisensi izin untuk berpraktek bagi anggotanya.

Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Arsitektur yang hanya berlaku di wilayah Jakarta, diterbitkan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: D.IV 2360/d/11/75 tanggal 22 Maret 1975.

Dalam waktu dekat di beberapa propinsi diharapkan juga akan diberlakukan sistem SIBP tersebut.

2) Keikutsertaan dalam Program P-4.

Sejak bulan Januari 1989, Ikatan Arsitek Indonesia telah mengikutsertakan Pengurus dan anggotanya dalam program Penataran P-4 Tingkat Nasional.

Dari Angkatan LXXXV, anggota/Pengurus IAI berjumlah 2 (dua) orang dinyatakan lulus sebagai Penatar Nasional.

3) Keikutsertaan IAI dalam Kode Etik Lingkungan.

Ikatan Arsitek Indonesia yang anggotanya sebagian besar Insinyur dan profesinya berkaitan erat dengan masalah

lingkungan, bersama dengan beberapa Asosiasi Profesi lainnya ikut mendatangi Kode Etik Lingkungan untuk insinyur.

Kode Etik berisi 7 (tujuh) butir tekad para insinyur untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup umat manusia.

4) Kegiatan Nasional dan Internasional.

Sejak berdirinya hingga sekarang Ikatan Arsitek Indonesia selalu mengikuti dan menyelenggarakan berbagai kegiatan baik yang bersifat Nasional maupun Internasional.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konggres Internasional Arcasia di Bali tahun 1987.

h. Penerbitan IAI

Dibawah koordinasi Badan SINFAR IAI, Ikatan Arsitek Indonesia sudah menerbitkan buku dan media cetak, yaitu:

- 1) Buletin bulanan ARSINDO - Pusat dan Cabang.
- 2) Journal IAI terbit setiap 4 bulan.
- 3) Buku Pedoman Hubungan Kerja Arsitek dengan Pemberi Tugas.
- 4) Buku Karya Arsitektur Arsitek Indonesia, jilid 1 dan 2.
- 5) Buku tahunan Ikatan Arsitek Indonesia.
- 6) Buku-buku Laporan Kongres IAI.
- 7) Buku rekaman Seminar-seminar IAI.